



Silencing Effect: Analisis Kekerasan Verbal Berbasis Gender Online terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Platform TikTok

Minerva Laisa Sabatini^{1*}, Azalia Salsabila², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*E mail: 6670230106@untirta.ac.id¹, 6670230107@untirta.ac.id², ika.arinia@untirta.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 6670230106@untirta.ac.id

Abstract. *The expansion of digital technology, particularly social media platforms, has created broader opportunities for public engagement in political discussions, including for women. Digital platforms allow women to share political perspectives, contribute to public opinion, and participate in political conversations that have traditionally been dominated by formal political actors. Nevertheless, the growing involvement of women in digital political spaces has also been accompanied by an increase in online gender-based violence (OGBV). This study aims to identify the forms of OGBV and examine its impact on women's political participation on social media. The research adopts a qualitative approach using discourse analysis to analyze public comments responding to political content posted by the influencer Satya Salsabila on TikTok. The findings indicate that women who express political opinions online frequently encounter personal attacks such as verbal harassment, sexually suggestive remarks, body shaming, and attempts to question or undermine women's credibility in discussing political matters. These acts of harassment not only function as symbolic violence against individuals but also reflect persistent gender stereotypes and patriarchal power relations that continue to shape interactions within digital environments. Such experiences may influence women's sense of security and confidence when expressing political viewpoints online, potentially limiting their participation in digital political discussions. Therefore, creating safer, more inclusive, and equitable digital spaces is essential to support women's active participation in political discourse.*

Keywords: *Digital Space; Online Gender-Based Violence; Political Discourse; Social Media; Women's Political Participation.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, termasuk bagi perempuan. Melalui berbagai platform digital, perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik, membentuk opini publik, serta ikut berpartisipasi dalam percakapan politik yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh aktor politik formal. Namun demikian, meningkatnya keterlibatan perempuan di ruang digital juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk KBGO serta menganalisis dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana yang berfokus pada komentar netizen terhadap konten politik yang diunggah oleh *influencer* Satya Salsabila di platform TikTok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengemukakan pandangan politik di media sosial sering kali menjadi sasaran serangan personal, seperti pelecehan verbal, komentar bermuatan seksual, body shaming, serta upaya meragukan kemampuan perempuan dalam membahas isu politik. Praktik kekerasan tersebut tidak hanya mencerminkan kekerasan simbolik terhadap individu, tetapi juga memperlihatkan masih kuatnya stereotip gender dan relasi kuasa patriarkal di ruang digital. Situasi ini berpotensi memengaruhi rasa aman dan kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan pandangan politiknya di ruang publik daring. Oleh karena itu, penting untuk mendorong terciptanya ruang digital yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi seluruh pengguna.

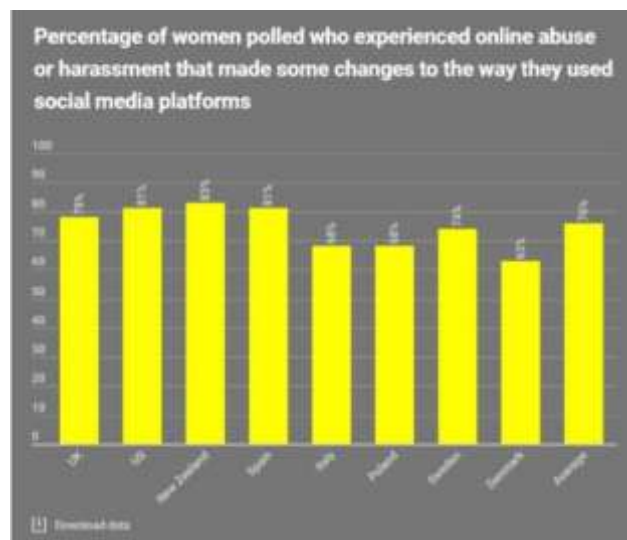
Kata kunci: Kekerasan Gender Online; Media Sosial; Partisipasi Politik Perempuan; Ruang Digital; Wacana Politik.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dua puluh tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah cara komunikasi politik dan keterlibatan warga negara. Media sosial telah berkembang menjadi tempat yang dapat diakses secara cepat dan terdesentralisasi untuk mobilisasi dukungan, wacana politik, dan pembentukan opini publik (Gorrell et al., 2020; Rheault et al., 2019). Dalam situasi seperti

ini, demokrasi digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas karena orang tidak lagi bergantung pada institusi formal seperti partai politik atau media arus utama untuk menyuarakan pilihan politik mereka. Berangkat dari persoalan tersebut, perempuan yang memiliki historis panjang dalam menghadapi hambatan struktural dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik formal, mampu memperoleh ruang baru untuk tampil sebagai aktor opini melalui media sosial.

Penyebaran ruang partisipasi secara digital ironinya tidak pula berjalan secara netral. Meningkatnya visibilitas perempuan di ruang digital diikuti oleh peningkatan pola kekerasan yang secara khusus menargetkan identitas gender mereka. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) mencakup pelecehan verbal, ancaman seksual, penghinaan terhadap tubuh, dan delegitimasi moral yang terjadi melalui media digital (Rani et al., 2023; Westmarland, 2025). Studi penelitian pada beberapa negara menunjukkan bahwa perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, menerima serangan yang lebih personal dan seksual, serta serangan yang lebih intens. Hal tersebut kemudian memengaruhi mentalitas hingga perilaku perempuan dalam penggunaan media sosial (Delisle et al., 2019; Meriläinen, 2025).

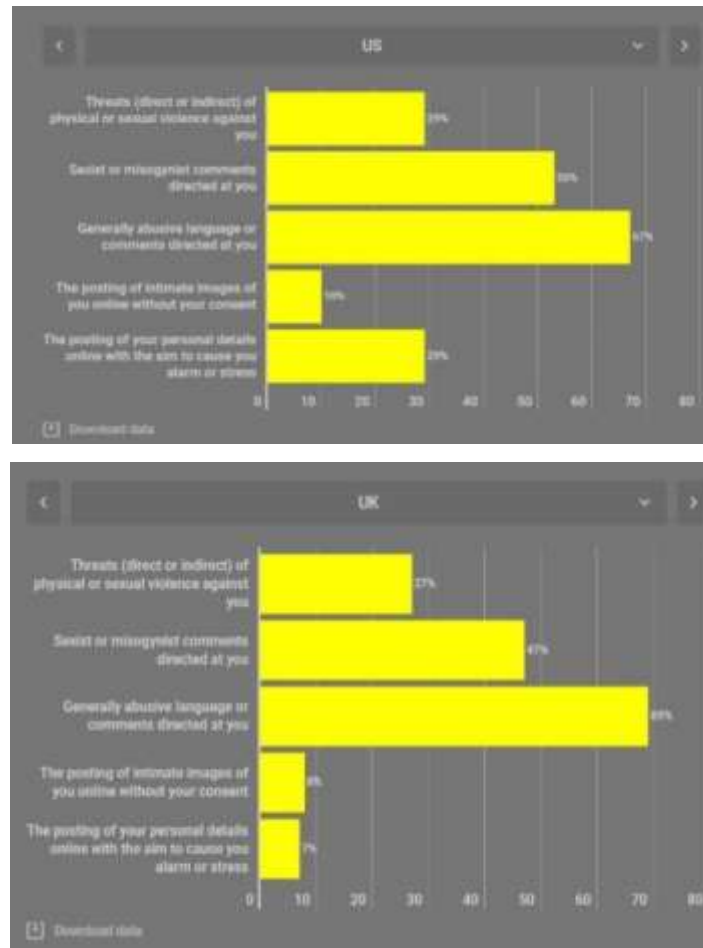


Gambar 1. Data Persentase Perempuan yang Mengalami Kekerasan atau Pelecehan Daring dan Melakukan Perubahan dalam Penggunaan Media Sosial.

Sumber: (Delisle et al., 2019).

Grafik ini menunjukkan persentase perempuan di beberapa negara (Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Spanyol, Italia, Polandia, Swedia, dan Denmark) yang melaporkan pernah mengalami kekerasan atau pelecehan daring hingga menyebabkan perubahan dalam cara mereka menggunakan media sosial. Data memperlihatkan bahwa lebih dari dua pertiga responden di hampir seluruh negara melakukan penyesuaian perilaku digital setelah mengalami kekerasan, dengan rata-rata global sebesar 75%. Angka tertinggi terlihat di Selandia Baru

(83%) dan Amerika Serikat (81%), yang mengindikasikan adanya dampak signifikan kekerasan daring terhadap praktik partisipasi digital perempuan. Serangan tersebut biasanya tidak berkonsentrasi pada argumen politik, tetapi pada tubuh, moralitas, hingga stereotip tentang perempuan di rumah (Delisle et al., 2019).



Gambar 2. Jenis Kekerasan Daring yang dialami Perempuan di Amerika Serikat dan Inggris.

Sumber: (Delisle et al., 2019).

Data empiris memperlihatkan pola yang konsisten. Delisle et al. (2019) menemukan bahwa komentar terhadap perempuan politisi dan jurnalis secara signifikan mengandung unsur seksual dan penghinaan personal (Delisle et al., 2019). *Incivility* terhadap perempuan dalam politik lebih sering berbentuk serangan identitas daripada kritik kebijakan (Rheault et al., 2019). Dalam konteks di Indonesia, Nurhidayah dan Nurhayati (2022) mengidentifikasi berbagai komentar di media sosial didominasi oleh serangan fisik dan moralitas perempuan figur publik di media sosial (Nurhidayah & Nurhayati, 2022). Pola tersebut menunjukkan bahwa ruang digital mereproduksi relasi kuasa patriarkal melalui bahasa yang bersifat merendahkan dan membatasi legitimasi perempuan sebagai subjek politik.

Fenomena tersebut semakin kompleks di platform TikTok sebagai salah satu platform yang kini tengah naik daun. Jutaan orang di Indonesia menggunakan platform TikTok yang didominasi oleh kelompok usia produktif yang aktif dalam diskusi sosial-politik.



Gambar 3. Diagram Distribusi Pengguna TikTok Berdasarkan Usia di Indonesia.

Sumber: (NapoleonCat.com, 2025).

TikTok didominasi oleh kelompok usia produktif yang secara sosial dan politik aktif dalam ruang digital, seperti yang ditunjukkan oleh dominasi kelompok usia 18 hingga 34 tahun, yang mencapai sekitar 70% dari pengguna total dan umumnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, konsumsi informasi yang signifikan, dan keterlibatan yang signifikan dalam diskusi sosial dan politik online. TikTok menjadi platform online publik yang efektif untuk menciptakan opini, menyebarkan berita politik, dan mendorong dukungan.

Kontribusi publik terhadap konten politik yang dibuat oleh setiap individu, meningkat melalui karakter algoritmik TikTok yang mendorong viralitas melalui *For Your Page*. Namun, kolom komentar yang terbuka dan kultur interaksi yang cepat menciptakan lingkungan yang justru subur untuk reproduksi kekerasan verbal berbasis gender. Anonimitas meningkatkan penggunaan bahasa seksual dan penghinaan berbasis gender yang lebih besar terhadap perempuan (Rosemary et al., 2024). Perempuan usia produktif yang aktif berpartisipasi di platform ini meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam diskursus politik digital, tetapi sekaligus meningkatkan risiko mereka terekspos terhadap praktik *harassment gender online* (Athirah et al., 2023). Berbagai persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks *influencer* perempuan yang menyatakan preferensi atau dukungan politik di TikTok. Komentar seksual yang jelas, penghinaan yang didasarkan pada stereotip gender, penilaian tubuh atau penampilan, dan pengawasan moral yang mempertanyakan kapasitas perempuan untuk berbicara tentang politik adalah semua bentuk serangan yang sering terjadi.

Dominasi pengguna usia produktif di TikTok, disertai tingginya intensitas percakapan politik di dalamnya, menegaskan bahwa platform ini telah berkembang menjadi ruang penting bagi artikulasi preferensi dan sikap politik. Dalam situasi tersebut, pengalaman yang dialami oleh seorang *influencer* perempuan bernama Satya Salsabila, mampu memberikan gambaran nyata mengenai kerentanan yang dihadapi perempuan ketika terlibat dalam diskursus politik digital. Sebagai *influencer* dengan jumlah pengikut lebih dari 4 juta pengguna TikTok (per 2024), Satya Salsabila yang kerap dikenal sebagai Bila L-nya satu, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo yang saat itu menjadi pasangan calon nomor urut 3 bersama dengan Mahfud MD, sekaligus menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pasangan calon nomor urut 2. Respons yang muncul di kolom komentar berkembang cepat dan meluas, tidak semata-mata berisi perdebatan mengenai substansi kritik atas kebijakan, tetapi juga mengandung serangan personal yang menyentuh dimensi gender, dan hal tersebut masih berjalan hingga awal penghujung tahun 2025.

Sebagian besar warga internet (warganet) mempersoalkan identitas Bila sebagai perempuan daripada berbicara tentang argumen yang diajukan. Pola serangan yang tidak netral secara gender terlihat dalam komentar yang merendahkan, mempertanyakan kapasitas intelektual, hingga menyinggung aspek fisik dan moralitas. Dalam kerangka *Online Gendered Harassment* yang dikembangkan oleh Emma A. Jane, bentuk respons ini sejalan dengan kategori *seksualized abuse*, *gendered insults*, dan *body-based degradation*. Serangan yang terjadi tidak hanya menunjukkan polarisasi politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma patriarkal berfungsi di ruang digital dengan menjadikan identitas dan tubuh perempuan sebagai objek yang tidak dapat diterima.

Posisi *influencer* sebagai aktor non-partai dalam demokrasi digital turut memperbesar eksposur terhadap dinamika semacam ini. Sistem algoritma TikTok yang mengandalkan distribusi melalui *For Your Page* memungkinkan konten politik menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Kondisi tersebut mempercepat sirkulasi komentar, termasuk komentar yang repetitif dan agresif. Situasi ini membuka ruang bagi munculnya *e-bile*, yakni ungkapan kebencian misoginis yang kasar dan vulgar, yang dalam pemikiran Jane dipahami sebagai mekanisme simbolik untuk membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Kritik terhadap pilihan politik Bila, dalam konteks ini tidak berhenti pada perbedaan pendapat, melainkan bergeser menjadi praktik delegitimasi yang menargetkan identitas gendernya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya menjadi ruang yang netral bagi perempuan yang menyampaikan pandangan politiknya. Kondisi ini

kemudian menimbulkan kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online bekerja dalam interaksi politik di media sosial. Walaupun sejumlah penelitian telah menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan dalam politik, sebagian besar kajian tersebut masih menitikberatkan pada kekerasan yang terjadi dalam arena politik formal, seperti yang dialami oleh kandidat perempuan, politisi, maupun jurnalis politik. Sementara itu, pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dalam ruang demokrasi digital, terutama oleh *influencer* perempuan yang menyatakan preferensi politiknya di media sosial, masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Padahal, perkembangan media sosial telah melahirkan aktor-aktor baru dalam politik digital yang memiliki peran penting dalam memengaruhi pembentukan opini publik, termasuk para *influencer* dengan jumlah pengikut yang besar. Selain itu, karakteristik platform seperti TikTok yang didukung oleh sistem algoritma viralitas dan ruang komentar yang terbuka turut menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyebaran dan pengulangan kekerasan berbasis gender terjadi dengan cepat dan luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online muncul serta beroperasi dalam interaksi politik di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pengalaman *influencer* perempuan di platform TikTok yang secara terbuka menyampaikan preferensi politiknya, serta pada penggunaan kerangka teori *Online Gendered Harassment* yang dikembangkan oleh Emma A. Jane untuk memahami bentuk serta dinamika kekerasan yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran TikTok sebagai ruang demokrasi digital bagi partisipasi politik *influencer* perempuan serta untuk melihat bagaimana praktik kekerasan berbasis gender online dapat mereproduksi relasi kuasa patriarkal sekaligus memengaruhi legitimasi perempuan sebagai subjek politik dalam diskursus politik digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *Online Gendered Harassment* menurut Emma A. Jane (Jane, 2018) di mana menurut Jane kekerasan di ranah digital yang dialami perempuan selain terkait perdebatan politik atau permasalahan juga mengalami pelecehan seksual berbasis verbal, intimidasi kekerasan dan pemerkosaan serta tindakan kekerasan seksual yang tidak diinginkan yang bertujuan untuk membungkam dan menekan perempuan agar tidak berpartisipasi di ranah publik digital. Dalam kasus ini Jane menyebutnya sebagai *gendered cyberhate* sebagai penggambaran kekerasan yang dialami perempuan di dunia internet, *gendered cyberhate* yaitu praktik kekerasan online yang menargetkan perempuan yang

mengarah pelecehan berbasis seksual, *cyberstalking* dan lainnya. Jadi nyatanya kekerasan tidak hanya di komentar akan tetapi sampai di titik penguntitan, pemalsuan identitas yang merugikan korban dan pelecehan yang dilakukan secara daring.

Di ranah digital, kekerasan yang dialami perempuan atau berbasis gender sangat banyak terjadi di era digital sekarang. Kejahatan tersebut sering kali mengarah ke perempuan dan menggunakan bahasa merendahkan identitas gender dan seksual (Nurhidayah & Nurhayati, 2022). Mengutip dari Jane terdapat beberapa indikator teori untuk mengukur kasus kekerasan berbasis gender di ranah digital di antaranya pertama *sexualized abuse* yaitu komentar yang bersifat hal seksual dan merendahkan tubuh perempuan. Kedua yaitu *threats of violence* yaitu tekanan atau ancaman kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan yang bertujuan untuk menekan perempuan yang berada di ranah digital. Ketiga *persistent harassment* yaitu penghinaan yang dilakukan secara berulang melalui komentar. Keempat *cyberstalking* dan *intimidation* yaitu pengawasan dan penekanan digital seperti menguntit *online*, pemalsuan identitas dan pemerasan seksual daring.

Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sulfiana, Muhammad Syukur dan Ridwan Said Ahmad (2023) dengan judul *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik di Indonesia* (Sulfiana et al., 2023) dengan metode kualitatif menjelaskan bahwa kuatnya patriarki di Indonesia menjadi salah satu alasan menurunnya partisipasi perempuan di ranah politik khususnya politik digital. Karena dalam faktanya perempuan masih sering mengalami kekerasan, marginalisasi dan pelecehan di ranah digital. Sedangkan dalam jurnal yang diterbitkan oleh Delia Wildianti dan Putri Ramadhana (2024) yang berjudul "*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Keterwakilan Politik Perempuan*" (Wildianti & Ramadhana, 2024) menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekerasan pada perempuan masih sering terjadi dalam pemilu seperti kekerasan terhadap fisik, simbolik dan seksual dan verbal. Kekerasan juga tidak hanya terjadi pada calon legislatif perempuan akan tetapi juga ke pemilih perempuan, calon pelaksana pemilu dan anggota tim sukses. Karena kekerasan tersebut menyebabkan berkurangnya partisipasi dan representasi perempuan dalam ranah politik dan partisipasi perempuan di ranah digital.

Terakhir jurnal yang berjudul "*Perlawanan Perempuan Digital: Kajian Semiotika Sosial terhadap Isu Kekerasan Seksual yang terbungkam di Situs Jejaring Sosial @aliskamugemash dan @GRESAIDS*" (HAPSARI & SARWONO, 2024) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki pelaku sering membuat korban mengalami kesulitan

untuk mendeskripsikan penolakan dan mengategorikan kejadian yang dialaminya termasuk ke dalam sebuah kekerasan seksual. Para korban cenderung membagikan pengalaman atas ketidakadilan kekerasan yang dialaminya melalui media sosial, maka dari itu media sosial disini berfungsi sebagai wadah perlawanan dan pemulihan untuk korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Dari penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang terlihat di mana persamaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas terkait kekerasan yang dialami perempuan. Kemudian terdapat pula perbedaannya di mana pada penelitian terdahulu hanya membahas kekerasan perempuan secara langsung akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada kekerasan yang dialami perempuan di ranah digital pada saat mereka sedang berpartisipasi dalam mengutarakan opini politiknya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) atau studi kepustakaan. Penelitian menurut Creswell (Creswell, 2013) adalah penelitian yang diawali dengan pemberian asumsi dan rangka teoritis yang akan berdampak pada studi riset terkait dengan maksud dari individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menciptakan laporan deskriptif yang berisi tulisan dan lisan terhadap orang-orang yang diamati.

Metode pustaka atau studi literatur menurut Asy'ari 2021 adalah penelitian yang dikaji menggunakan karya ilmiah yang sudah atau belum di publikasikan. Dalam penelitian yang menggunakan metode studi pustaka tidak melakukan penelitian lapangan akan tetapi mencari dan menghipun data-data dan informasi yang berasal dari buku, laporan, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data tentunya dengan mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan kalo menurut Apriliani, dkk 2020 menyebutkan teknik pengumpulan data dari metode studi pustaka terdiri dari pertanyaan penelitian, alur pencarian, aspek batasan dan masukan, indikator penelitian, pengumpulan data, serta analisis data dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang dialami *Influencer* Perempuan di Platform TikTok

Terdapat berbagai macam komentar dan reaksi yang ditujukan kepada *influencer* Satya Salsabila atau yang dikenal sebagai Bila L-nya satu atas pilihan politik yang dirinya suarakan di platform TikTok pada tahun 2024 silam. Sebagian besar, komentar yang dilontarkan berbentuk kekerasan hingga pelecehan secara verbal. Hal tersebut menyimpang dari konteks pilihan politik yang dirinya suarakan. Berikut beberapa komentar yang diberikan oleh para *netizen* pada kolom komentar akun milik *influencer* Bila L-nya satu tersebut.



Gambar 4. Komentar yang Tidak Pantas terhadap *Influencer*.

Komentar pada gambar 4 menunjukkan bentuk sebuah komentar yang tidak pantas terhadap *influencer* Bila sebagai pendukung Ganjar Pranowo, sekaligus terhadap Ganjar Pranowo itu sendiri yang saat itu mencalonkan diri sebagai calon presiden nomor urut 3 yang maju bersama Mahfud MD. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak atas suara dan hak pilihnya. Ironinya, semakin dunia digital berkembang, ternyata tidak menjamin pola pikir masyarakat ikut berkembang dalam memahami hak yang dimiliki setiap orang. Penggunaan kata “*ani ani*” yang dipahami sebagai suatu istilah yang negatif terhadap perempuan muda yang menjadi simpanan seorang pria kaya raya yang biasanya sudah memiliki istri, kemudian komentar itu juga seolah menuduhkan Ganjar Pranowo sebagai ‘pria kaya raya beristri’ tersebut. Hal ini mampu menjadi bentuk tuduhan yang mengarah kepada pelecehan verbal atas tuduhan “*ani ani*” hanya karena bersuara mendukung pasangan calon tersebut.

Perempuan yang sedari awal menjadi sebuah objek paling mudah untuk mendapatkan berbagai bentuk kekerasan, menjadi semakin rentan saat dunia yang semakin berkembang atas dunia digital (Gorrell et al., 2020; Istiqomah et al., 2025). Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak berhenti di kehidupan nyata, kemudian dibawa masuk dan diteruskan ke dalam dunia digital. Hal tersebut mampu menjadikan kaum perempuan cenderung menutup

diri dan enggan bersuara, karena segala bentuk komentar yang perempuan terima sudah mengarah ke hal-hal yang berbau seksual. Berikut salah satu bentuk komentar yang mengarah ke hal-hal yang berbau seksual pada kolom komentar *influencer* Satya Salsabila.



Gambar 5. Bentuk Kekerasan Verbal yang Mengarah Pada Pelecehan Seksual.

Komentar pada gambar 5 menunjukkan bentuk kekerasan verbal yang mengarah pada pelecehan seksual terhadap *influencer* Satya Salsabila. Komentar yang muncul seperti “Penggemar Bokep” dan “muka dia kuat ya” tidak lagi menanggapi substansi argumen politik yang disampaikan, melainkan justru menyoroti tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek ejekan. Pola komentar seperti ini merupakan salah satu bentuk *sexualized abuse* sebagaimana dijelaskan dalam konsep Online Gendered Harassment oleh Emma A. Jane, di mana perempuan yang tampil di ruang publik digital sering kali diserang melalui bahasa yang merendahkan tubuh dan identitas gendernya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa diskursus politik di media sosial tidak selalu berjalan secara rasional, melainkan sering kali dipenuhi dengan serangan personal yang bertujuan untuk mendeligitimasi perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan opini politik (Setyowati et al., 2023).



Gambar 6. kekerasan verbal yang sangat serius terhadap *influencer*.

Komentar pada gambar 6 menunjukkan bentuk kekerasan verbal yang sangat serius terhadap *influencer* Satya Salsabila. Salah satu komentar bahkan menyatakan harapan agar dirinya mengalami pemerkosaan ketika berada di luar negeri. Pernyataan tersebut tidak hanya merupakan bentuk penghinaan, tetapi juga mengandung unsur ancaman kekerasan seksual yang secara langsung menargetkan tubuh dan keselamatan perempuan. Komentar seperti ini menunjukkan bagaimana ruang digital sering kali menjadi tempat reproduksi kebencian berbasis gender, di mana perempuan yang menyampaikan pandangan politiknya justru diserang melalui ancaman seksual. Alih-alih membahas substansi opini politik yang disampaikan, warganet justru mengalihkan diskusi ke bentuk kekerasan yang sangat personal dan merendahkan martabat perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perempuan yang tampil di ruang publik digital menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi sasaran serangan misoginis dibandingkan laki-laki.

Selain itu, munculnya balasan komentar seperti “amin” yang diikuti oleh beberapa pengguna lain menunjukkan adanya bentuk normalisasi terhadap kekerasan tersebut. Dukungan yang diberikan melalui komentar singkat tersebut memperlihatkan bahwa sebagian pengguna media sosial tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga turut memperkuat dan melegitimasi ujaran kekerasan yang terjadi. Pola interaksi semacam ini memperlihatkan bagaimana kekerasan berbasis gender di ruang digital dapat berkembang secara kolektif, di mana satu komentar agresif memicu respons serupa dari pengguna lain.



Gambar 7. komentar identitas personal seorang perempuan.

Pada gambar 7, komentar yang ada memperlihatkan bagaimana identitas personal seorang perempuan di ruang digital dapat dengan mudah dijadikan bahan ejekan oleh warganet. Pertanyaan mengenai “Bila L-nya satu, L-nya apa?” pada awalnya tampak seperti permainan kata yang merujuk pada nama akun yang digunakan oleh *influencer* tersebut. Namun, respons

dari pengguna lain yang menjawab dengan kata berkonotasi seksual menunjukkan bahwa percakapan tersebut dengan cepat bergeser menjadi bentuk humor yang merendahkan. Pergeseran makna ini memperlihatkan bagaimana warganet sering kali menggunakan bahasa yang ambigu atau permainan kata untuk menyisipkan makna seksual terhadap perempuan yang tampil di ruang publik digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di media sosial tidak selalu hadir dalam bentuk serangan yang secara langsung bersifat agresif, tetapi juga dapat muncul melalui candaan atau komentar yang tampak ringan. Dalam praktiknya, humor yang bernuansa seksual ini tetap memiliki implikasi merendahkan karena menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek lelucon publik.

Analisis Teori Jane Pada Kasus Kekerasan Berbasis Gender Onling Yang Dialami Satya Salsabila

Fenomena kekerasan yang terjadi pada *influencer* di platform TikTok dapat di analisis menggunakan teori Emma A. Jane, di mana menurut Jane kekerasan gender di ranah digital tidak hanya perbedaan opini dan kritik politik akan tetapi sudah mengarah pada serangan individu yang mengarah pada identitas gender perempuan, pada akhirnya kekerasan tersebut akan mempengaruhi partisipasi perempuan pada politik di ranah digital dan membungkam suara mereka (Santi, 2025). Dari keempat indikator Jane yang pertama yaitu *sexualized abuse* yaitu model pelecehan yang di dalamnya memuat unsur seksual atau merendahkan tubuh perempuan. Jika di lihat dari kasus Satya Salsabila di mana dirinya mendapatkan kekerasan yang sudah mengarah pada tubuh karena banyak orang berkomentar tidak lagi tentang pendapat politiknya akan tetapi mengarah ke *personal* satya, seperti salah satu komentar ”ani-ani” yang merupakan stereotip untuk merendahkan perempuan dengan menuduhnya sebagai wanita simpanan para paslon yang dia dukung. Selain itu komentar seperti ”penggemar bokep” dan lainnya yang merendahkan fisik Satya Salsabila. Hal ini menunjukan bahwa komentar yang diterima oleh Satya tidak lagi mengarah pada kritik terhadap opini politiknya akan tetapi menjadikan tubuh dan identitas gender sebagai bahan ejekan.

Indikator kedua yaitu *threats of violence* yang merupakan sebuah ancaman kekerasan pada perempuan termasuk juga ancaman pemerkosaan dan kekerasan fisik lainnya (Kalaloi, 2017). Pada kasus ini Satya Salsabila mendapatkan sebuah doa dalam salah satu komentar yaitu ”semoga mengalami pemerkosaan saat di luar negeri”. Hal tersebut termasuk juga pada ancaman kekerasan seksual karena secara tidak langsung menargetkan dengan mendoakan keselamatan dan tubuh perempuan. Komentar seperti itu tidak hanya sebagai penekanan tapi

juga menekan perempuan untuk tidak berpartisipasi politik di ranah digital. Pada *Online Gendered Harassment* biasanya kekerasan seksual digunakan untuk mempertahankan dominasi patriarki dengan menjadikan perempuan berada pada keadaan yang terintimidasi dan rentan.

Indikator ketiga yaitu *persistent harassment* yaitu bentuk pelecehan atau merendahkan yang dilayangkan secara terus menerus dan berkala lewat komunikasi digital. Kasus yang terjadi pada Satya Salsabila dapat dilihat bahwa komentar yang menyerang personal dilakukan secara terus menerus dan komentar tersebut tidak hanya tunggal akan tetapi banyak komentar di bawahnya yang saling menjawab antar pelaku dan terkesan saling menguatkan komentar yang berbau kekerasan gender tersebut. Model tersebut membuktikan bahwa kekerasan digital selalu berkembang secara viral dan kolektif terutama di Tiktok yang menggunakan sistem algoritma untuk mendorong interaksi secara aktif dan cepat (Handayani et al., 2025). Indikator *peristent harassment* termasuk kedalam bagian dari *e-bile* yang artinya suatu kebencian misogini yang vulgar dan kasar yang diperluas secara berulang di ranah digital. Serangan yang berulang memberikan dampak yang besar terhadap pelaku yaitu akan mempengaruhi psikologis korban karena merasa ruang digital bukan merupakan tempat yang aman. Maka dari itu banyak perempuan yang mulai berhenti dan menjauh membicarakan politik di ruang digital seperti yang terjadi pada Satya Salsabila yang sudah tidak membicarakan politik lagi di akun Tiktoknya.

Terakhir yaitu *cyberstalking* dan *intimidation* yang merupakan model pengawasan digital, memantau atau intervensi psikologis yang bertujuan untuk mengintimidasi perempuan di ruang digital. Pada kasus yang dialami Satya Salsabila dapat dilihat dari akun Tiktoknya yang dijadikan bahan ejekan seperti "Bila L-nya satu" kemudian diplesetkan menjadi L nya Lonte dan masih banyak lainnya yang mengandung maksud seksual. Walaupun terlihat seperti bahan candaan akan tetapi yang seperti ini lah yang disebut dengan pelecehan simbolik (Kahanna, 2025). Menurut pendapat Jane intimidasi yang alami perempuan menunjukkan perempuan dalam ruang digital selalu berada pada kondisi yang diawasi dan dinilai secara personal oleh publik. Bentuk pelecehan yang mengarah pada tubuh, identitas bahkan nama dilakukan untuk merendahkan martabat perempuan. Intimidasi seperti ini menjadikan perempuan merasa setiap gerakannya selalu diawasi dan berpeluang mendapatkan serangan.

Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Perempuan menghadapi kekerasan berbasis gender di internet, yang berdampak pada keterlibatan mereka dalam diskursus politik di media sosial, selain serangan verbal. Komentar yang bernuansa pelecehan seksual, penghinaan terhadap tubuh, dan ancaman kekerasan menunjukkan bahwa perempuan yang menyuarakan pendapat politik sering kali bukan dinilai berdasarkan argumen yang mereka katakan, tetapi lebih pada identitas gender mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia digital, yang seharusnya memfasilitasi pertukaran ide, justru dapat menjadi tempat yang tidak ramah wanita (Cobis, 2023).

Dalam kasus yang dialami oleh *influencer* Satya Salsabila, komentar yang muncul di kolom unggahannya menunjukkan bahwa perdebatan yang terjadi tidak lagi berfokus pada substansi opini politik yang ia sampaikan. Sebagian besar respons warganet justru mengarah pada serangan personal yang menyinggung moralitas, tubuh, hingga seksualitasnya sebagai perempuan. Serangan semacam ini menciptakan tekanan sosial yang dapat memengaruhi kenyamanan perempuan ketika menyampaikan pandangan politiknya di ruang publik digital (Aziz et al., 2024). Ketika perempuan terus-menerus menjadi sasaran komentar yang merendahkan, mereka cenderung merasa bahwa keterlibatan dalam diskusi politik di media sosial membawa risiko yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Dampak lain yang muncul adalah kecenderungan perempuan untuk membatasi aktivitas digitalnya. Serangan yang terjadi secara berulang dapat membuat korban memilih untuk menghindari diskusi politik, mengurangi interaksi dengan pengguna lain, bahkan berhenti membicarakan isu politik di akun media sosialnya (Aziz et al., 2024). Fenomena ini terlihat dalam kasus Satya Salsabila, di mana setelah mengalami berbagai komentar bernuansa kekerasan berbasis gender, konten yang berkaitan dengan politik tidak lagi muncul secara intens di akun TikTok miliknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan digital dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang secara tidak langsung membungkam suara perempuan di ruang publik daring.

Selain itu, kekerasan berbasis gender online juga berdampak pada legitimasi perempuan sebagai subjek politik (Indasah, 2025). Ketika komentar yang muncul lebih banyak menyoroti aspek fisik, stereotip gender, atau moralitas perempuan, maka opini yang disampaikan menjadi terpinggirkan dari perdebatan yang rasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa patriarkal tetap bekerja di ruang digital dengan cara mendeligitimasi perempuan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai isu politik (Indasah, 2025; Meriläinen, 2025). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperkuat ketimpangan partisipasi

politik antara laki-laki dan perempuan di ruang digital. Kekerasan berbasis gender online tidak hanya menjadi persoalan etika komunikasi di media sosial, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi digital. Ketika perempuan merasa tidak aman untuk menyampaikan pandangannya, maka ruang diskursus publik akan kehilangan keberagaman perspektif yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Media sosial memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan menyampaikan pandangan mereka di ruang publik digital. Namun, keterlibatan tersebut sering kali diiringi dengan munculnya kekerasan berbasis gender online (KBGO) seperti pelecehan verbal, komentar seksual, dan serangan terhadap identitas gender yang dialami perempuan ketika menyuarakan opini politiknya. Kasus yang dialami oleh Satya Salsabila menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi perbedaan pendapat, tetapi juga serangan personal yang merendahkan dan mendeligitasi mereka sebagai aktor politik. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan sosial yang membuat perempuan menjadi lebih berhati-hati, membatasi ekspresi politiknya, bahkan menarik diri dari diskusi publik di media sosial. Oleh karena itu, keberadaan ruang digital yang aman dan inklusif menjadi penting agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam percakapan politik tanpa mengalami kekerasan berbasis gender.

Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan yang berpartisipasi dalam diskursus politik. Platform media sosial seperti TikTok perlu memperkuat sistem moderasi konten serta mekanisme perlindungan terhadap pengguna yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi yang etis di ruang digital juga menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik kekerasan berbasis gender dan mendorong terciptanya ruang demokrasi digital yang lebih setara.

DAFTAR REFERENSI

- Athirah, S. (2023). Women's agency and resistance to cyber flashing on Twitter. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 28(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v28i1.13562>
- Aziz, M. H., Maharani, M., Adriyani, A., & Putera, A. B. S. (2024). Sudut pandang spiral of silence theory dalam kelompok minoritas. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.24036/scemp.v1i2.36>

- Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). Analisis teori spiral of silence pada persepsi publik tentang citra polisi oleh media massa. *Journal of Political Issues*, 4(2), 99–107. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.92>
- Delisle, L., Kalaitzis, A., Majewski, K., de Berker, A., Marin, M., & Cornebise, J. (2019). A large-scale crowdsourced analysis of abuse against women journalists and politicians on Twitter. *arXiv*. <http://arxiv.org/abs/1902.03093>
- Gorrell, G., Bakir, M. E., Roberts, I., Greenwood, M. A., & Bontcheva, K. (2020). Online abuse toward candidates during the UK general election 2019: Working paper. *arXiv*, 1–21. <http://arxiv.org/abs/2001.08686>
- Handayani, L., Mahdalena, V., Bp, R. L., & Uljanatunnisa. (2025). Dinamika gender dalam ruang maya. *Global Komunika*, 8(2), 1–10.
- Hapsari, I. C., & Sarwono, B. K. (2024). Perlawanan perempuan digital: Kajian semiotika sosial terhadap isu kekerasan seksual yang terbungkam di situs jejaring sosial @aliskamugemash dan @gresaid. *Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.61511/jwesb.v1i1.652>
- Indasah, K. (2025). Sexism, feminist, social media, X, txttarifeminist. 7(2), 231–266.
- Istiqomah, I., Sastia, M., Salsabila, E., & Rangkuti, R. (2025). The language of shame in cyber discourse: A critical discourse analysis of gendered moral policing on X media. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 9(2), 382–397. <https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/48850>
- Jane, E. A. (2018). Gendered cyberhate as workplace harassment and economic vandalism. *Feminist Media Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447344>
- Kahanna, M. (2025). Kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam media populer. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 11612–11621. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1914>
- Kalaloi, A. F. (2017). Media sosial dan keberanian mengutarakan pendapat di era kontemporer: Menilik teori spiral of silence dalam ruang media sosial.
- Meriläinen, J. M. (2025). The role of gender in hate speech targeting politicians: Evidence from Finnish Twitter. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 38(3), 423–449. <https://doi.org/10.1007/s10767-024-09476-3>
- Nurhidayah, & Nurhayati, I. K. (2022). Kekerasan verbal terhadap perempuan di media sosial Instagram (Analisis isi kualitatif pada kolom komentar Instagram @masterchefina). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 3419–3424.
- Rani, C., Destiana, N., & Angeliie, D. (2023). Kekerasan berbasis gender (KBG). *PKBI DIY*, 8(1). <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>
- Rheault, L., Rayment, E., & Musulan, A. (2019). Politicians in the line of fire: Incivility and the treatment of women on social media. *Research & Politics*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2053168018816228>
- Rosemary, R., Wardhana, A. B., Syam, H. M., & Susilawati, N. (2024). The relationship between anonymity and cyber sexual harassment. *Communication in Media and Public Health*, 6(2), 95–104. <https://doi.org/10.51602/cmhp.v6i2.131>
- Santi, T. (2025). Spiral of silence: Teori pengaruhnya terhadap opini publik dan media, 1–16.

- Setyowati, R. M., Watie, E. D. S., & Tatas, H. L. (2023). *Jurnal Ilmu Nusantara*, 6(1), 64–78. <https://doi.org/10.54783/jin.v6i1.888>
- Sulfiana, S., Syukur, M., & Ahmad, R. S. (2023). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam wajah politik di Indonesia. *Nirwasita*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>
- Westmarland, N. (2025). Violence and abuse against women in cyberspace. In *Violence against women* (pp. 181–189). <https://doi.org/10.4324/9781003300960-17>
- Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu dan dampaknya terhadap keterwakilan politik perempuan. *Masyarakat Indonesia*, 50(1), 95–108. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8695>